

PERIZINAN BERUSAHA – PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

PERBUP NO. 27 BD. 2021. NO. 27 LL. KAB. PEMALANG : 16 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu menerapkan pelayanan perizinan secara elektronik dan berbasis resiko. Dalam rangka peningkatan penanaman modal di daerah maka perlu menerapkan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan pertimbangan maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perores No. 91 Tahun 2017; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal no. 4 Tahun 2021; Perda No. 23 Tahun 2016; Perda No. 1 Tahun 2018; Perbup No. 56 Tahun 2016; Perbup No. 32 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha; Penyelenggaraan Perizinan; Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Pelaku Usaha; Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur; Manajemen Pelayanan; Pengawasan; Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Juni 2021
  - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Terdiri dari 35 Pasal
  - Lampiran 2 halaman